

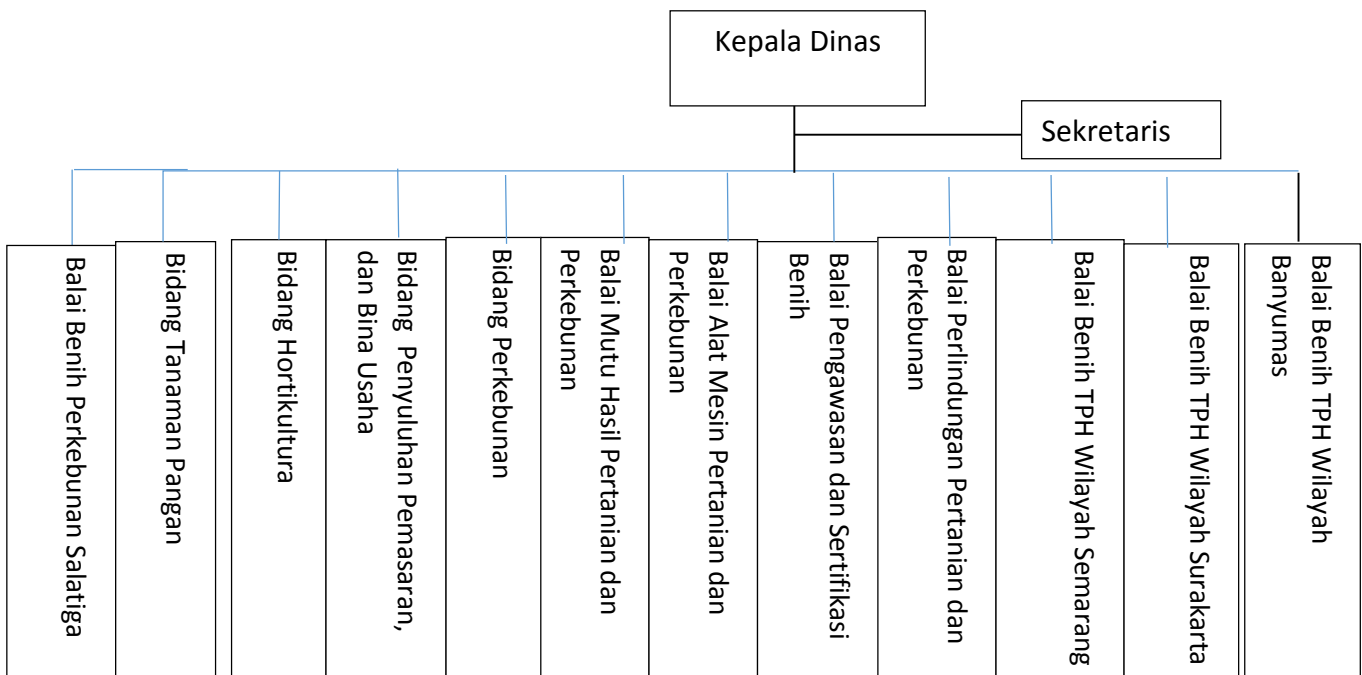
BAB II

**KARAKTERISTIK UMUM *TRAINER* PERTANIAN ORGANIK DAN
PERSEPSI PETANI ORGANIK DI JAWA TENGAH**

2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Perkebunan Jawa Tengah

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pertanian Dan Perkebunan Jawa Tengah



Dalam hal ini struktur organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan memiliki empat bidang utama yaitu bidang tanaman pangan, bidang hortikultura, bidang pemasaran, bidang pengolahan dan bina usaha. Bidang P2PU serta bidang perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim, tanaman tahunan, rempah dan penyegar.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Produksi Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman semusim;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman tahunan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman rempah dan penyegar; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang penyuluhan, pasca panen dan bina usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pasca panen dan pengolahan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina usaha;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi, jagung dan sereal lainya dan aneka kacang dan umbi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Tanaman pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang padi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang jagung dan sereal lainya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang aneka kacang dan umbi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran, tanaman buah serta tanaman hias dan tanaman obat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayuran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Hortikultura, terdiri atas:

- a. Seksi Tanaman Sayuran;
- b. Seksi Tanaman Buah; dan
- c. Seksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat;

Seksi Tanaman Sayuran mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman sayuran;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman sayuran;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya sayuran lintas kabupaten/kota;
- d. menyiapkan bahan pola produksi sayuran lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas sayuran lintas kabupaten/kota;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman sayur; dan g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Tanaman Buah mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman buah;
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman buah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya sayuran lintas kabupaten/kota;
- d. Menyiapkan bahan pola produksi sayuran Lintas kabupaten/kota;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas sayuran lintas kabupaten/kota;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman buah;
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tanaman hias dan tanaman obat;.
- b. Menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang tanaman hias dan tanaman obat;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelaksanaan teknologi budidaya tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota;
- d. Menyiapkan bahan pola produksi tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota;
- e. Menyiapkan bahan pengaturan dan penerapan sentra/kawasan produksi komoditas tanaman hias dan tanaman obat lintas kabupaten/kota;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang tanaman hias dan tanaman obat; dan
- g. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

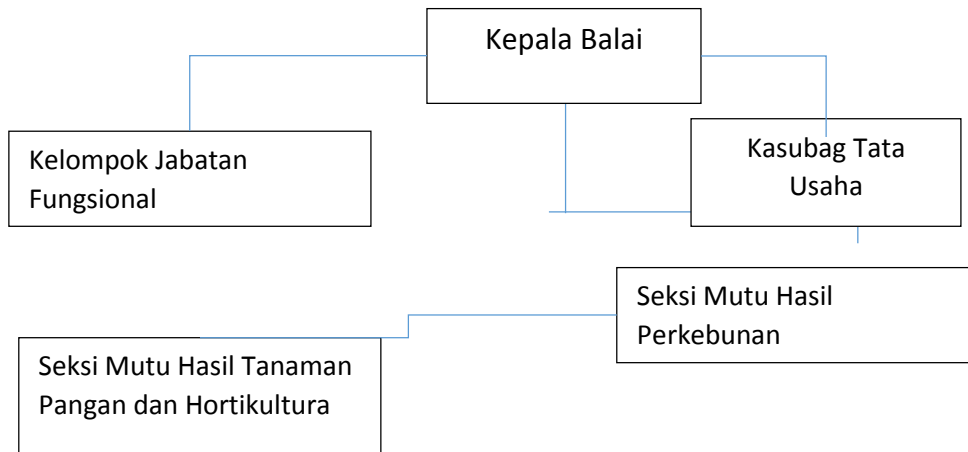
Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana produksi, prasarana, pengolahan lahan, air dan konservasi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan di bidang sarana produksi;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan dibidang prasarana, pengolahan lahan, air dan konservasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 2.2

Struktur Organisasi Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah



Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang alat mesin dan pengujian mutu hasil perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Balai Mutu Hasil Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan alat mesin perkebunan dan pengujian mutu hasil perkebunan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis operasional pengelolaan alat mesin perkebunan dan pengujian mutu hasil perkebunan;
- c. Pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang alat mesin dan pengujian mutu hasil perkebunan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Gambaran Umum *Trainer* Pertanian Organik

Trainer merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan petani. Di mana *trainer* menjadi faktor utama untuk penyaluran ilmu bagi petani. Pada aktivitasnya training pertanian organik terdapat kegiatan komunikasi dan penyebaran inovasi kepada petani anggota kelompok tani, terlibat banyak faktor, salah satu faktor yang sangat penting adalah komunikator, orang yang menyampaikan pesan, dalam hal ini adalah *trainer* dan komunikan sebagai penerima pesan dalam hal ini petani.

Trainer sendiri mempunyai berbagai kompetensi seperti :

- Kompetensi dan ketrampilan berkomunikasi, dimana penyuluh mempunyai Kompetensi dan ketrampilan untuk beremphati dan berinteraksi dengan masyarakat sasarannya , sehingga penyuluh mempunyai Kompetensi untuk menyesuaikan pemilihan inovasi yang tepat, menggunakan saluran komunikasi yang efektif, memilih dan menerapkan metode penyuluhan yang efektif dan efisien, menggunakan alat bantu dan alat peraga yang efektif dan murah.
- Sikap penyuluh yang menghayati dan bangga terhadap profesinya, serta merasakan bahwa kehadirannya untuk melaksanakan tugas penyuluhan, sangat dibutuhkan masyarakat penerima manfaatnya. Hal ini termasuk :
 - Meyakini bahwa inovasi yang disampaikan telah teruji kemanfaatannya dan inovasi yang akan disampaikan sesuai kebutuhan masyarakat sasarannya.
 - Menyukai dan mencintai masyarakat sasarannya, dimana selalu siap memberikan bantuan dan melaksanakan kegiatan demi berlangsungnya perubahan usahatani maupun kehidupan masyarakat penerima manfaat.

- Kompetensi pengetahuan penyuluh yang menguasai fungsi-fungsi, manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam inovasi yang disampaikan baik secara konseptual maupun secara praktis. Pengetahuan penyuluh yang menyangkut :
 - Pengetahuan tentang latar belakang dan keadaan masyarakat sasarannya, yang menyangkut perilaku, nilai-nilai sosial budaya serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat sasarannya.
 - Pengetahuan tentang alasan mengapa masyarakat suka atau tidak menghendaki terjadi perubahan atau cepat/ lambat masyarakat mengadopsi inovasi.
- Karakteristik sosial budaya yang harus dimiliki penyuluh, dengan latar belakang sosial budaya yang sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat sasarannya. Setidak-tidaknya jika seorang penyuluh yang akan bertugas di wilayah kerja selalu berusaha untuk menyiapkan diri dan berusaha mempelajari dan menghayati nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. sehingga lebih mudah berkomunikasi dan menyebarkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat sasarannya.

2.7 Tugas *Trainer* Pertanian Organik

Adapun tugas *trainer* sistem pertanian organik adalah mensosialisasikan sistem pertanian organik berdasarkan SNI 6729-2016 dan Permentan no.64/OT.140/5/2013. *Trainer* akan mensosialisasikan sistem pertanian organik kepada petani yang akan menerapkan pertanian organik. Sosialisasi terdiri dari : Kebijakan pengembangan pertanian organik di Jawa Tengah, Budidaya Pertanian Organik Berdasarkan SNI dan Permentan, Pengantar Dokumen Sistem Mutu Pertanian Organik, Manajemen kelompok, sejarah lahan, manajemen resiko, serta tata cara sertifikasi organik.

Membantu menyusun dokumen mutu sistem baik panduan mutu dan lampiran-lampiran maupun SOP budidaya. Sering ditemukan bahwa petani kurang

memahami penyusunan dokumen sistem mutu karena dianggap terlalu rumit dan prosesnya terlalu panjang. Padahal dokumen sistem mutu sendiri ditujukan untuk mengecek apakah kegiatan pertanian organik sudah berjalan dengan baik. Untuk mengatasinya petani dibantu untuk pembuatan kerangka dokumen dan bagaimana cara menyusun dokumen sistem mutu.

Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan sertifikasi organik. Di tahun awal ketika permohonan sertifikasi organik banyak petani yang tidak melengkapi persyaratan permohonan sertifikasi organik. Beberapa faktor seperti kondisi lapangan dan kurangnya sistem pengawasan internal dalam kelompok petani menyebabkan persyaratan kurang lengkap.

Mendampingi kelompok tani saat pelaksanaan sertifikasi oleh LSO. Saat pelaksanaan sertifikasi LSO melalui pihak ketiga saat pertama kali proses pelaksanaan sertifikasi terutama saat inspeksi terjadi miskomunikasi antara LSO dengan petani. Maka dengan

Membantu kelompok tani menyelesaikan temuan ketidaksesuaian pada saat audit dan memastikan temuan ketidaksesuaian dijawab benar oleh petani. Jika terjadi ketidaksesuaian dokumen dengan audit lapangan maka *trainer* akan membantu petani untuk memperbaiki apabila masih bisa diperbaiki.

Berkomunikasi dengan LSO untuk memastikan hasil akhir keputusan sertifikasi. Hasil akhir sendiri juga harus diberitahukan dari LSO kepada *trainer*. Sehingga apabila hasil bagus ataupun tidak akan menjadi evaluasi oleh *trainer* dan petani

2.8 Metode Pengajaran

Sosialisasi pertanian organik sendiri merupakan tahap dimana petani diberikan materi mengenai pertanian organik. Untuk materi sendiri diberikan dalam lima bagian. Jumlah keseluruhan jam mengajar sebesar 24 jam pelajaran untuk sosialisasi dengan waktu 1 jam pelajaran sama dengan 45 menit. Tiap

bagian berbeda beda jumlah pembagian jamnya. Biasanya sosialisasi dilakukan dalam 2 hari Berikut pembagian waktu tiap bagian materi.

No	Materi	Jumlah Jam Pelajaran
1.	Kebijakan pengembangan pertanian organik di Jawa Tengah	2 jam
2.	Budidaya Pertanian Organik Berdasarkan SNI dan Permentan	6 jam
3.	Pengantar Dokumen Sistem Mutu Pertanian Organik	6 jam
4.	Manajemen kelompok, sejarah lahan, manajemen resiko	4 jam
5.	Tata cara sertifikasi organik	4 jam

Ada beberapa hal yang menjadi catatan semua materi ini dijelaskan secara umum. Untuk lebih lanjut akan dilakukan oleh inspeksi ke tiap kelompok tani.

Kemudian bimbingan teknis pengawalan dan penyusunan sistem mutu pertanian organik adalah bimbingan yang dilakukan selama 3 hari dengan waktu 36 jam pelajaran dengan catatan 1 jam sama dengan 45 menit. Bimbingan ini dilakukan di lokasi pertanian organik. Untuk pembagian materi sebagai berikut.

1	Kebijakan Pertanian Organik Kabupaten/Lokasi	2 jam
2	Sistem Kendali Internal/Internal Control System dalam pertanian organik	4 jam
3	Menyusun Dokumen Sistem Mutu pertanian organik sesuai lokasi dan komoditas	8 jam
4	Menyusun standar operasi prosedur budidaya sesuai ruang lingkup komoditas	8 jam
5	Menyiapkan lampiran-lampiran dokumen sistem mutu	4 jam
6	Latihan Audit Internal	2 jam

Pengajuan sertifikasi merupakan tugas *trainer* organik dalam melakukan pendampingan pengajuan ke lembaga sertifikasi organik pihak ketiga. Jika lolos maka petani dapat sertifikat organik.

2.9 Pandangan Petani terhadap Sistem Pertanian Organik.

Pemerintah telah berusaha mendukung pengembangan pertanian organik dengan meluncurkan Program Go Organic 2010 pada tahun 2001. Misi program ini adalah untuk pengembangan ecoagribusiness dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial (Budianta 2004). Kegiatan yang dilakukan di antaranya pengembangan teknologi pertanian organik, pembentukan kelompok tani, serta strategi pemasaran produk organik. Diharapkan pada 2010 Indonesia menjadi pemain pasar organik dunia dan tercipta kesempatan untuk meningkatkan pendapatan petani (Hidayat dan Lesmana 2011). Sebenarnya, sebelum program ini digulirkan, beberapa kelompok tani di daerah tertentu di Jawa Tengah maupun Jawa Barat telah memelopori sistem pertanian organik sejak tahun 2000. Namun, penyebaran dan adopsinya masih lambat karena mayoritas petani kurang tertarik untuk mempraktikkan pertanian organik. Hal ini disebabkan mereka belum memahami manfaatnya, terutama bagi perbaikan kualitas tanah (Utami dan Handayani 2003; Sugiyanto et al. 2006).

Ketidakberhasilan Program Go Organic 2010 yang diindikasikan dengan sedikitnya petani yang mengadopsi pertanian organik perlu dicari solusinya. Sebagian kalangan menganggap ini hal wajar mengingat sistem pertanian organik dianggap relatif baru. Sementara di sisi lain, petani sudah puluhan tahun terbiasa dengan pertanian konvensional yang sangat agrochemical minded sebagai konsekuensi diadopsinya revolusi hijau pada awal 70-an. Rogers (2003) dengan teori diffusion of innovation (DOI) menyebutkan bahwa adopsi merupakan sebuah proses pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, petani perlu waktu untuk mempelajari, memahami, atau mencoba inovasi yang diperkenalkan tersebut. Sangat mungkin bagi petani untuk memodifikasi (re-invention), melakukan secara bertahap, bahkan menunda adopsi. Ringkasnya, tidak mudah mengubah kebiasaan lama petani dan menggantikannya dengan praktik baru (inovasi) yang mungkin berbeda.

Kemudian kendala yang bersifat mikro yang dijumpai di tingkat usaha tani, khususnya petani kecil. Beberapa kendala mikro tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

(1) Petani belum banyak yang beminat untuk bertani organik. Keinginan tersebut terutama masih belum jelasnya pasar produk pertanian organik, termasuk premium harga yang diperoleh. Minat petani untuk mempraktekkan pertanian organik ini akan meningkat apabila pasar domestik dapat ditumbuhkan. Oleh karena itu, upaya mempromosikan keunggulan-keunggulan produk pertanian organik kepada para konsumen perlu digiatkan;

(2) Kurangnya pemahaman para petani terhadap sistem pertanian organik. Pertanian organik sering dipahami sebatas pada praktek pertanian yang tidak menggunakan pupuk anorganik dan pestisida. Seperti telah dikemukakan diatas, pengertian tentang sistem pertanian organik yang benar perlu disebarluaskan pada masyarakat. Sebagai acuan untuk penyebarluasan pengertian pertanian organik sebaiknya menggunakan standar dasar yang dirumuskan oleh IFOAM dan SNI;

(3) Organisasi di tingkat petani merupakan kunci penting dalam budidaya pertanian organik. Hal ini terkait dengan masalah penyuluhan dan sertifikasi. Agribisnis produk organik di tingkat petani kecil akan sulit diwujudkan tanpa dukungan organisasi petani. Di beberapa daerah organisasi petani sudah terbentuk dengan baik, tetapi masih banyak yang belum terbentuk dengan baik. Dorongan pemerintah agar para petani membentuk asosiasi seperti yang terjadi pada akhir-akhir ini, khususnya di sektor perkebunan, akan dapat berdampak positif terhadap pengembangan agribisnis produk organik; dan

(4) Kemitraan petani dan pengusaha, upaya membentuk hubungan kemitraan antara petani dan pengusaha masih belum memberikan hasil seperti yang diharapkan petani. Kemitraan antara petani dan pengusaha

merupakan salah satu kunci sukses dalam pengembangan produk pertanian organik, khususnya apabila diarahkan untuk ekspor.

Berdasarkan analisis SWOT petani dalam menerapkan pertanian organik mempunyai kondisi sebagai berikut:

Strenght	Weakness
<p>Adanya sosialisasi dari pemerintah</p> <p>Adanya fasilitasi dari pemerintah</p> <p>Adanya pengawalan penyusunan</p> <p>Dokumen sistem mutu dari pemerintah</p>	<p>Pengetahuan dan ketrampilan petani mengenai Sistem Jaminan Mutu dalam pertanian organik masih kurang</p> <p>Produk pertanian belum banyak yang mempunyai jaminan mutu keamanan pangan.</p> <p>Cara penyusunan dokumen sistem mutu yang dianggap rumit.</p>
Opportunity	Threats
<p>Harga jual produk organik relatif lebih baik.</p> <p>Adanya tren untuk hidup sehat dengan konsumsi produk pangan yang mempunyai sistem jaminan mutu keamanan pangan</p> <p>Teknologinya lebih mudah dikuasai</p>	<p>Adanya produk yang berlabel sehat atau ramah lingkungan tetapi belum bersertifikat Organik.</p> <p>Akses informasi teknologi dan produk yang bersertifikat susah didapatkan</p> <p>Kebiasaan petani yang masih menjalankan teknologi yang tidak ramah lingkungan</p>